



SUPARDI KETUA DPRD SUMBAR
IRSYAD SAFAR WAKIL KETUA DPRD SUMBAR
SUWIRPEN SUIH WAKIL KETUA DPRD SUMBAR
INDRA DT RAJO LELO WAKIL KETUA DPRD SUMBAR
RAELIS SEKRETARIS DPRD SUMBAR

KOMISI II SELESAIKAN PEMBAHASAN PERDANYA

Pengelolaan Hutan Sumbar Diharapkan Lebih Tertata

PARANG - SINGGALANG

Pasca telah disahkannya peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan hutan, DPRD Sumbar berharap penerapannya akan optimal di lapangan.



Perda tersebut telah diselesaikan pembahasan dan penyusunannya oleh Komisi II DPRD Sumbar. Kemudian telah disahkan DPRD dalam rapat paripurna 5 April lalu.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Mochlasin memaparkan, keluarnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Dari kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa, kegiatan perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat

setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. "Hingga kini, pemerintah memiliki dua agenda besar yang menjadi sorot utama terkait dengan pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif," paparnya.

Oleh karena itulah, lanjut Mochlasin, perda perhutanan sosial yang merupakan inisiatif DPRD Sumbar ini disusun. Tujuannya agar perda ini nantinya dapat memberikan dorongan percepatan mencapai tujuan pemerintah, yakni memastikan hutan sebagai sa-



rana pengentasan kemiskinan masyarakat. Selain juga memastikan pengelolaan lahan, khususnya di sekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. "Program ini adalah program perhutanan Sosial di Sumatera Barat," katanya.

Program perhutanan sosial sendiri kata Mochlasin bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program ini akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Sementara itu Ketua tim membahas perda Perhutanan Sosial Arkadius Dt. Intan Bano mengatakan perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hak hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat. Pemerintah pusat, lanjut Arkadius, telah menancangkan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare. "Selain di tingkat pusat, kebijakan ini juga diimplementasikan di tingkat provinsi," ujarnya.

Kebijakan ini pun sudah dimasukkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut disebutkan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Sumbar dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. "Apalagi mengingat Sumbar memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 2,2 juta hektare atau sekitar 54,4 persen dari luas provinsi ini. Selain itu, sebanyak lebih dari 900 nagari di Sumbar berada di kawasan hutan,"katanya. Kawasan hutan ini terdiri dari fungsi kawasan suaka alam, hutan lin-

terbatas, hutan produksi, hutan produksi konversi.

Arkadius menjelaskan, perda ini diharapkan bisa mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan dalam perhutanan sosial. "Dengan begitu pengelolaan hutan kedepannya dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya," paparnya.

Arkadius mengatakan, penyusunan perda perhutanan sosial ini telah mengikuti prosedur Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yakni aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah No-

mor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

"Perda perhutanan sosial ini merupakan ranperda yang pertama kali diusulkan se-Indonesia. Dan saat ini telah banyak informasi keinginan beberapa kawan DPRD dari provinsi lain untuk melakukan studi tiru ke Sumbar terkait perda ini," ungkapnya.

Arkadius juga menyampaikan, hingga kini, pemerintah memiliki 2 agenda besar yang menjadi sorot utama terkait dengan pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.

Saat pengesahan perda tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan perhutanan sosial merupakan konsep pengelolaan hutan yang memberikan peran aktif kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya hutan. "Dengan disahkannya perda ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, serta pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dan berdaya guna," ujar Supardi.

Supardi dalam kesempatan itu juga mengapresiasi atas kinerja Komisi II yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab melaksanakan pembahasan perda tersebut. (*)



SERBANEKA



SERAHKAN
Anggota DPD RI Emma Yohanna menyerahkan buku kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Drs. Syahendri Barkah usai kunjungan kerjanya. (*)

KUNKER ANGGOTA DPD RI EMMA YOHANNA

Kota Padang Butuh Satu Unit Mobil Tera

PADANG - SINGGALANG

Kota Padang membutuhkan satu unit mobil tera untuk melakukan pengawasan di 9 pasar dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai timbangan dan pompa ukur. Tujuannya demi kenyamanan konsumen mendapatkan produk sesuai ukuran yang ideal.

Itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Drs. Syahendri Barkah kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Emma Yohanna saat kunjungan kerja (Kunker) terkait Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Serta Perubahannya Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peneetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, di Aula Dinas Perdagangan Kota Padang, Senin (22/4).

"Sebenarnya, dahulu kami sudah memiliki mobil tera, tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Mobil ini sangat dibutuhkan untuk melakukan

ke 9 pasar yang dikelola Kota Padang dan perusahaan-perusahaan memiliki timbangan. Salah satu SPBU," ucap Drs. Syahendri Barkah. didampingi Sekretaris Dinas Junie Nuryamza, SSPT, Kabid Kemetrologian Yeni Rizal, SE, M.Kom, Kabid Bapokring Edrian Edward SH MH, Fungsional Pengawas Kemetrologian Ferdinand Yuyan ST, M.Si.

Lebih lanjut dijelaskannya, mobil tera ini menampung petugas dan peralatan tera dan tera ulang ke setiap pasar dan perusahaan-perusahaan demi melindungi masyarakat dari kecurangan akibat alat ukur yang tidak benar, dan memastikan proses jual-beli telah berlangsung dengan baik dari segi penentuan nilai ukur suatu barang.

"Kami secepatnya akan memberikan proposal kepada ibu Emma Yohanna untuk disampaikan dan usulkan dalam rapat dengan kementerian terkait. Mengingat wilayah kami untuk melakukan tera/tera ulang sangat luas, sehingga membutuhkan mobil untuk menjangkaunya," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI Emma Yohanna mengatakan kedatangannya merupakan dalam rangka

kunjungan kerja menjemput aspirasi masyarakat.

"Kami bertugas di Jakarta selama 2 bulan, 1 bulan di daerah pemilihan. Inilah yang kami manfaatkan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, mendengar aspirasi dan memperjuangkan aspirasi tersebut di Jakarta," kata Emma yang selanjutnya keinginan dari Dinas Perdagangan Kota Padang akan disampaikan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Emma Yohanna pun menyam-

paikan perhatian serius dari Kementerian Perdagangan terhadap pembangunan pasar rakyat.

"Keinginan serius dari wakil menteri untuk pembangunan pasar rakyat. Saya sudah tawarkan ke masing-masing Dinas Pariwisata di Kabupaten Kota di Sumbar. Kalau ada keinginan dari Kota Padang untuk pembangunan pasar rakyat, segera buatkan proposalnya yang akan saya sampaikan dalam rapat dengan Kementerian Perdagangan RI," tegas Emma Yohanna. (009)



BERSALAMAN - Rektor Unes Prof Sufyarma Marsidin bersalaman dengan jajaran YPTP usai halal bi halal di Auditorium Kampus Unes Padang, Senin (22/4). (*)

TOKOH AGAMA USTADZ AZIZ

Terima dan Hormati Hasil Pemilu 2024 dengan Legowo

PADANG - Tokoh agama, ustadz Aziz mengajak semua pihak harus menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilihan umum (pemilu) 2024 dengan sikap legowo, satria, sikap kenegarawan dengan semangat berbangsa dan bernegara positif.

"?Mari kita menghormati hasil pemilu yang telah ditetapkan KPU. Jangan terprovokasi oleh isu-isu hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita bersama-sama mengawal proses demokrasi yang telah berlangsung dengan baik dan lancar," kata Aziz salah seorang tokoh agama di Bukittinggi.

Aziz mengapresiasi KPU, Bawaslu termasuk TNI, Polri dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ia juga berharap agar tidak ada pihak yang merusak suasana damai dan harmonis yang telah tercipta selama ini.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan semua pihak yang telah bekerja keras dan profesional dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Kami berdoa agar tidak ada pihak yang mengganggu dan mengacaukan situasi keamanan dan kondusifitas yang telah terjaga dengan baik," ujar Aziz.

Terakhir Aziz mengatakan, hasil Pemilu 2024 adalah hasil dari suara rakyat yang juga dalam perspektif agama adalah ketentuan dari Allah SWT. Karena itu, mari semua perbedaan ini dikesampingkan untuk kembali bersatu.

Apalagi, saat ini adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan kontestasi politik dan fokus pada pembangunan kesatuan. Ia menekankan pentingnya saling bermaaf-maafan setelah perayaan Idul Fitri.

"Mari bermaaf-maafan satu sama lain dan kalau kita bisa kembali mempererat kesatuan di antara kita semua. Insya Allah siapapun yang akan memegang amanat akan bisa menjalankannya dengan lebih baik," ucapnya. (109)

Pererat Tali Silaturahmi, YPTP Gelar Halal Bi Halal

PADANG - Seluruh jajaran Yayasan Perguruan Tinggi Padang (YPTP) mulai dari Universitas Ekasakti-Akademi Akuntansi Indonesia (Unes-AAI), SMA dan TK Ekasakti menggelar halal bi halal di Auditorium Universitas Ekasakti, Senin (22/4).

Pertemuan bersama usai lebaran ini dihadiri Ketua YPTP, Dr Andi Mukkuradde berlangsung secara hikmat dan diakhiri makan siang bersama seluruh jajaran YPTP.

"Pertemuan ini bertujuan menyambung kembali hubungan yang terputus dan memperkuat hubungan agar selalu harmonis," ucap Dr Andi Mukkuradde seraya berharap semua pegawai dan dosen serta guru di lingkungan YPTP melakukan kinerja dengan baik, sehingga semua yang keinginannya tercapai.

Hal senada juga disampaikan, Rektor Unes Prof Sufyarma Marsidin.

"Halal bi halal ini, sebagai pemererat tali silaturahmi dan menjadi ajang saling bermaaf-maafan antara pimpinan dengan seluruh dosen, staf dan karyawan, maupun antar para dosen dan para staf karyawan," ucap Sufyarma Marsidin seraya menyebutkan kalau halal bi halal merupakan kesempatan berbagi perasaan dan keluhan hingga kegembiraan dengan sesama manusia. Tak hanya itu, kegiatan ini pun bisa sebagai ajang penyampaian informasi berbagai perkembangan di universitas ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua Masjid Al Mustari, Agusallim Manguluang. Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan terkait kegiatan yang dilakukan selama bulan suci Ramadhan. (009)